TAJUK RENCANA

Jangan Lagi Buruh Jadi Sapi Perahan

Aksi para buruh yang memacetkan ibukota, tak pelak kemudian direspon Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan agar tuntutan kenaikan upah minimum yang diajukan oleh para buruh diselesaikan secara utuh tanpa menyisakan persoalan yang masih mengganjal.

Tentunya ini merupakan respon Aksi unjuk rasa buruh ini dipicu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan Apindo Kabupaten Bekasi yang memerintahkan Gubernur Jawa Barat merevisi SK UMK tahun 2012. Artinya, upah buruh batal naik 30 persen menjadi Rp1.491.000.

Demo besar-besaran pun dilakukan. Ratusan ribu buruh turun ke jalan. Peserta demo buruh tidak hanya pekerja dari perusahaan di kawasan industri Kabupaten Bekasi. Ribuan buruh dari Bandung juga datang untuk memberikan dukungan.

Kita tentunya merespon positif perintah yang disampaikan Presiden kepada para menteri terkait untuk menyelesaikan tuntutan para buruh. Jangan sampai tuntutan hak para buruh mengganggu produksi dan kepentingan masyarakat banyak. Tentunya juga dalam penetapan upah agar disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Semua pihak tentunya harus sadar akan banyak dampak dari aksi para buruh. Lihat saja pernyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi. Dia mengungkapkan bahwa demonstrasi besar-besaran para buruh di Bekasi pekan lalu membuat sejumlah perusahaan asing berencana merelokasi pabrik mereka dari wilayah Jabodetabek.

Untuk itu, Sofjan mengusulkan perusahaan-perusahaan asal Jepang dan Korea Selatan merelokasi pabrik-pabriknya ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. "Untuk perusahaan Jepang dan Korea, saya bilang lebih baik mundur sajalah ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata dia, di Jakarta, Selasa (31/1). Menurut Sofjan, dampak demo buruh minggu lalu cukup besar, terutama terhadap investasi yang berhubungan dengan *labor intensive industry* (industri yang membutuhkan banyak pekerja). Selain itu, dampak berikutnya adalah terhadap usaha kecil menengah (UKM).

> **Intisari**
>
> **Upah yang layak akan sangat menentukan kesejahteraan buruh.**

"Yang ini kita perjuangkan sekarang ini adalah bukan untuk perusahaan yang besar-besar, di mana para perusahaan masih bisa membayar upah minimum buruh. Akan tetapi, usaha-usaha kecil menengah kita. Itulah yang menjadi masalah utama kita," ungkapnya.

Sofjan menegaskan, pemerintah tidak mengerti bagaimana upah minimum tersebut, karena upah itu digeneralisir, di mana jenis perusahaan yang besar dan kecil juga harus membayar. "Yang kita perjuangkan saat ini adalah yang minta tolong dengan pihak Apindo adalah orang-orang yang tidak mempunyai organisasi dan para pengusaha kecil menengah yang tidak ada insentif," ujarnya.

Namun kemudian pemerintah menolak anggapan bahwa rendahnya upah tenaga kerja Indonesia menjadi salah satu indikator keuntungan dalam bersaing dengan negara lain. Kesejahteraan tenaga kerja turut perlu diperhatikan.

Demikian Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, saat diminta tanggapan mengenai rendahnya upah tenaga kerja menjadi faktor daya saing dengan negara lain. "Pekerja kita harus sejahtera," ujar Hatta usai rapat di Jakarta, pekan lalu. Hatta melanjutkan keseimbangan perlu ada di dunia bisnis. Di samping pekerja, perusahaan juga perlu mendapat untung dengan peningkatan produktivitas pekerjaannya. "Negaranya juga harus mendapatkan pajak. Semuanya harus serasi seimbang," katanya. Komitmen para pekerja untuk meningkatkan produktivitas, tambahnya, menjadi daya tawar lain dalam meningkatkan daya saing industri Tanah Air.

Namun diharapkan juga ke depan jangan lagi buruh menjadi sapi perahan dari para pemilik perusahaan. Kemudian karena kesal dengan seorang buruh, perusahaan bisa sewenang-wenang memecat karyawan, padahal itu tidak lebih dari upaya untuk mengurangi pekerja dengan cara halus. Jadi ke depan pekerja itu harus benar-benar dimanusiawikan, sesuaikanlah upah dengan pekerjaan dan tentu saja keadaan si pekerja agar ke depan tidak akan ada lagi keributan.****

APA KOMENTAR ANDA

SMS	Faks	Email
08974718101	061 4510025	komentar@waspada.co.id

+6281396244485
Akhir-akhir ini banyak kekerasan yg terjadi di tanah air, hal ini terjadi karena kita tdk bisa menahan emosi. Padahal Allah Swt menyuruh Rasulullah utk memiliki kebiasaan menahan emosi dgn firmanNya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yg ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yg bodoh." (QS Al A'raaf 199). Kemudian firman Allah yg lain di QS Asy-Syura 43: "Dan orang yg sabar dan memaafkan sesungguhnya yg demikian itu termasuk hal-hal yg diutamakan". Dan terakhir sabda Rasulullah tentang menahan emosi adalah: "Barang siapa menahan emosi, padahal ia mampu melampiaskannya, ia dipanggil Allah didepan seluruh makhluk utk memberi kebebasan kepadanya dlm memilih bidadari, lalu Dia menikahkannya dgn bidadari pilihannya seperti Dia kehendaki".

+6281260577889
Rubrik bayolan di SMW hr Minggu 22-1-2012 sudah brpa kali diulang penerbitannya, kayaknya sudah kehabisan bahan utk dijadikn bayolan (ANWAR IDRIS DI PERBAUNGAN).

+6282165293457
Ya Allah bukakanlah pintu hati pemimpin-pemimpin kami yang telah menganiaya dirinya terimalah taubatnya dia tidak akan menjadi penolong orang-orang yang berdosa berikanlah petunjuk kejalan yang benar engkau mengetahui apa yang dikerjakannya.

+6282161886831
Yth bapak2 Pemerintah dan DPR. "Pemerintah dan DPR hrus sgr mengembalikan undang2 '45 yg diamandemen Gusdur dan Amin Rais dan Nurwahid" karena ini lah membuat rakyat kecil ini sengsara tapi pemerintah dan DPR tdk "memikirkan rakyat sedikit" karena semua diserahkan sama "org asing" trutama ekonomi dan manyarnakan hak pribumi dan luar pribumi ini lah yg "merusak negara ini" mana memilik kan telapak tangan undang2 ini lah di tarik Amin Rais dan Nurwahid "pemerintah liat malasia lebih banyak cina penduduk nya dari pada org melayu tapi tdk" diberikan kuasa pada 100 persen umat muslim penduduknya bisa gini "aduuh nasib" jdi pribumi pun bisa. Astagpirulloh berpikirlah DPR2 minta pertanggjawaban yg ngubah2 nya. wassalam.

+6287892415737
Urusan ibadah kembalikan kepada Qur'an dan Hadis jika gak mampu merujuk langsung ikutilah ulama yang merupakan pewaris Nabi yang mempunyai kompetensi. Lihat salah satu negara tetangga kita, soal agama mereka percayakan pada ulama mereka, pemerintah dan masyarakatnya mendukung dan patuh serta padu.

+6285359455667
Kpd YTH Bpk Ngongesa.
Mohon Kepala Lurah sei bilah barat Kec Seilepan untuk di tegur karena kinerja tidak baik.

+6281265333535
Dirgahayu Waspada 65 Tahun Selalu Tetap Jaya dan Makin Dekat Di Hati Pembacanya.

+6285199572197
TETAP BERFUNGSI *
Sebagaimana di Kota-Kota Raya di Jawa dan MancaNegara. Dibangun dibuka yang baru, namun yang lama tetap di operasikan. Bukan karena Sudah Dibangun Arena PerTokoan didekatnya, lantas Bandar Udara Bersejarah itu dibenamkan. Hal ini DILARANG TERJADI. Tetapi yang WAJIB DILARANG; Investor Bukan meninggikan lagi Buildingnya. The Soekarno-Hatta AIR PORT dibangun, namun The Halim Perdana Kusuma AIR PORT tetap beroperasi. The K.L. AIR PORT dibina / dibangun, namun The Subang AIR PORT, tetap rancak denyut jantung nya. The KualaNamo AIR PORT dibangun, namun The Polonia AIR PORT tetap SEBAGAI The Polonia AIR PORT. Tentu saja semua yang tersebut, International Class. Antenatur Asistence Kantoor Governement supaya tidak berfikir lain #
Dikirim oleh: D M N Sejak - TepiBarat Medan City.

+6282165264916
Tikus di kantor DPR/MPR lebih ganas di bandingkan tikus rumahan tikus rumahan makan (bunuh) ayam, tikus DPR/MPR BUNUH RAKYAT INDONESIA!!! SALUT!!!
Gomi Phat Cai, Wasallam'

Sekrenario Pendidikan Menembus Perbatasan

Oleh Dr Lisyanto, MSi

Hanya melalui upaya pembangunan yang komprehensif masyarakat di daerah 3T mampu meningkatkan harkat dan martabatnya

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan manusia seutuhnya mengandung pembangunan [illegible] an yang diterapkan pemerintah mampu melahirkan insan [illegible] yang memiliki kapasitas dalam olah pikir, olah hati, olahraga, dan olah rasa sebagai pilar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di seluruh penjuru negeri.

Karenanya, program pengembangan pembangunan yang diagendakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah haruslah tepat sasaran, seimbang, berkeadilan, dan menjangkau ke pelosok hingga menembus perbatasan yakni daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Kesenjangan akses pendidikan terjadi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan serta masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan (terdepan dan terluar) dengan masyarakat yang tinggal di pusat kota. Hal yang serupa juga berlaku bagi guru sebagai aktor pendidikan. Guru yang bertugas di perkotaan memperoleh akses yang lebih baik terkait program peningkatan mutu guru seperti informasi, pendanaan, dan fasilitas pendidikan dan pelatihan, sebaliknya guru yang bertugas di daerah 3T mengalami kesulitan luar biasa untuk mengakses fasilitas seperti itu.

Kondisi tersebut mengakibatkan guru yang berkualitas keberatan bahkan tidak bersedia ditugaskan di daerah 3T. Oleh karena itu diperlukan langkah yang sistematis untuk mendongkrak citra dan mutu pendidikan di daerah 3T agar kesenjangan tersebut tidak semakin melebar dan bergeser menjadi ancaman bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

37 persen berstatus 3T

Data Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tahun 2010 menunjukkan, dari 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, masih terdapat 183 kabupaten atau 37 persen yang berstatus sebagai daerah tertinggal, yakni daerah yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Kriteria dasar yang digunakan Kementerian PDT dalam menentukan daerah tertinggal tersebut antara lain adalah perekonomian masyarakat, sumberdaya manusia, infrastruktur, kemampuan keuangan lokal, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Pada daerah tertinggal ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayah seperti air bersih, listrik, dan irigasi nyaris tidak ada. Kondisi tersebut tentu sangat menghambat pertumbuhan kehidupan masyarakatnya baik dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan).

Hal serupa juga terjadi untuk daerah terluar dan terdepan, yakni daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan dan terisolasi secara geografis. Dari 183 kabupaten tertinggal tersebut, 27 kabupaten merupakan daerah perbatasan dan 156 kabupaten daerah non perbatasan. Dari daerah perbatasan dan non perbatasan tersebut terdapat 23 kabupaten yang memiliki pulau terluar.

Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya program pembangunan yang serius dan komprehensif terhadap prasarana, sarana dan infrastruktur lainnya di daerah 3T. Karena hanya melalui upaya pembangunan yang komprehensif masyarakat di daerah 3T mampu meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai bangsa Indonesia yang senantiasa memperkokoh ketahanan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Belum sarjana dan mismatch

Pembangunan pendidikan di daerah 3T perlu terus dipacu agar kualitasnya tidak jauh berbeda dengan daerah perkotaan. Di samping infrastruktur, fasilitas, dan sarana pendidikan satu hal penting yang tidak boleh terlupakan dalam pembangunan pendidikan di daerah 3T adalah rekrutmen guru baru dan peningkatan mutu guru yang sudah ada. Hal tersebut dikarenakan masalah pokok dalam penyelenggaraan pendidikan di daerah 3T adalah kurangnya jumlah guru (*shortage*), guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya (*mismatch*), kualifikasi guru di bawah standar (*under qualification*) yakni belum sarjana/D-4, dan kompetensi guru masih rendah (*low competencies*).

Persoalan lain pendidikan di daerah 3T adalah distribusi guru yang tidak merata akibat guru yang kompeten dan berpengalaman lebih memilih bertugas atau mengurus pindah tugas ke daerah perkotaan. Kondisi tersebut menjadi faktor pemicu terhadap semakin besarnya disparitas kuantitas dan kualitas guru antara daerah 3T dan daerah perkotaan.

Perlu dirumuskan skenario yang tepat agar pembangunan pendidikan di daerah 3T berjalan sesuai harapan. Minimal ada tiga skenario yang dapat ditempuh untuk membangun pendidikan di daerah 3T terutama terkait dengan pola rekrutmen guru.

Pertama, program Sarjana Mendidik di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM-3T), yakni program pengabdian sarjana pendidikan untuk berpartisipasi dalam percepatan pembangunan pendidikan di daerah 3T selama satu tahun guna menyiapkan guru yang profesional yang akan dilanjutkan dengan program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program tersebut ditujukan kepada para Sarjana Pendidikan (S.Pd) yang baru beberapa tahun lulus untuk ditugaskan sebagai guru di daerah 3T dengan fasilitas biaya hidup dan insentif yang memadai.

Kedua, program calon guru utusan daerah, yakni program unggulan daerah 3T untuk mengkader dan merekrut calon guru yang nantinya ditugaskan di daerah asalnya. Peserta program ini adalah putra daerah yang memiliki kemauan dan kemampuan akademik untuk disekolahkan ke Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan ikatan Beasiswa Utusan Daerah (BUD). Setelah menamatkan studinya yang bersangkutan diangkat dan ditugaskan menjadi guru di daerahnya.

Ketiga, program guru ikatan dinas, yakni program rekrutmen guru dari beberapa daerah untuk ditempatkan di daerah 3T tertentu. Yang dapat mengambil program ini adalah mahasiswa LPTK yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata dan mempunyai pengalaman dalam berorganisasi di kampus. Calon guru tersebut dikontrak dengan beasiswa ikatan dinas mulai dari semester lima hingga selesai studinya. Setelah lulus calon guru tersebut diangkat oleh pemerintah pusat untuk ditugaskan menjadi guru di daerah 3T dan tidak boleh mengusulkan pindah tugas.

Apabila salah satu sekrenario tersebut dipilih dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, maka dalam waktu yang tidak terlalu lama, daerah 3T akan mengalami perkembangan yang signifikan, sehingga masyarakat di daerah 3T mampu maju bersama untuk berpartisipasi dalam pembangunan serta turut serta dalam menikmati hasil-hasilnya.

Penulis adalah Dosen Dan Staf Ahli Pembantu Rektor I Unimed.

Di Balik Pembatasan BBM Bersubsidi

Oleh Tri Wahyuni TPB

Pembatasan BBM bersubsidi itu untuk meliberalisasi Migas di sektor hilir guna memberi jalan bagi swasta asing untuk masuk dalam bisnis eceran Migas.

Pemerintah akan memberlakukan pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April 2012. Ini terjadi saat pemerintah dan DPR menyepakati UU No. 22 tahun 2011 tentang APBN 2012 yang mengamanatkan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Kebijakan pemerintah ini jelas merugikan masyarakat, sebab sama artinya dengan menaikkan BBM 100 persen, pasalnya bagi mereka yang selama ini mengkonsumsi premium dipaksa membeli pertamax yang harganya 2 kali lipat.

Tak terkecuali kalangan pengusaha khususnya UMKM pun turut merasakan imbasnya. Sebab, akan makin menukul daya saing produk. Bukan cuma biaya produksi yang meninggi karena biaya transportasi, tapi bahan baku juga pasti ikut naik. Akhirnya, kendati demikian pelaku UMKM terpaksa menaikkan harga jualnya, dan dipastikan masyarakat berfikir 1000 kali untuk membeli. Itu artinya daya beli masyarakat merosot. Akhirnya, banyak UMKM yang akan gulung tikar.

Lantas, benarlah memang dari awal dan kini terbukti untuk sekian kalinya, dari sisi yang lain pula demokrasi itu hanya sebuah wacana. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat kini berganti menjadi dari 1 persen, oleh 1 persen, untuk 1 persen, mereka adalah para kapitalis yang jelas-jelas hanya mereka yang akan menikmati lezatnya hidup dalam sistem kapitalis-demokrasi.

1001 alasan

Berbagai pakar, ahli, profesi, lembaga, organisasi memiliki pandangan hampir seragam dalam menanggapi persoalan pembatasan subsidi BBM, yaitu menolak. Meskipun mengenai solusi yang ditawarkan di sini masih terdapat jurang perbedaan. Salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia yang pada 21 Januari 2012, Sabtu lalu dalam aksi simpatik jelas menyatakan sikap penolakan atas pembatasan BBM bersubsidi. Tak lain dan tak bukan upaya pembatasan BBM bersubsidi jelas merupakan program liberalisasi Migas di negeri tercinta ini. Begitu hasil analisa politiknya.

Tentu apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir tidak sekedar 'turun ke jalan' namun berbagai upaya telah dilakukan. Tak lupa memohonkan pada Allah SWT agar diampuni dosa pemerintah, serta ditunjuki ke jalan yang benar *mumpung* masih berada di dunia ini. Jadi 1001 alasan yang dikatakan pemerintah sebenarnya jelas hanya *live service* belaka, dan penuh tipu muslihat.

Tipuan itu adalah: subsidi membebani APBN? Realisasi konsumsi BBM bersubsidi selama 2011 membengkak sehingga anggaran subsidi BBM juga membengkak dari Rp129,7T menjadi Rp160T. Kalau mau jujur, yang membebani APBN adalah pembayaran hutang dan bunganya serta penggunaan APBN yang boros (mubazir). Contoh anggaran pembayaran hutang tahun 2012 sebesar Rp170T (bunga Rp123T dan cicilan pokok utang LN Rp43T). Tragisnya, tahun 2012 pemerintah terus menambah utang dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp134T dan utang LN sebesar Rp54T. Padahal ada dana APBN 2010 Rp57,42T ditambah sisa APBN 2011 Rp39,2T. Pertanyaannya untuk apa hutang ditambah, tapi ada sisa dan tidak digunakan? Padahal utang LN dan bunga SUN itu harus dibayar tiap tahunnya hingga triliunan. Ada apa di balik ini?

Sisi lain ternyata terlihat pada beberapa indikasi: *pertama*, banyak pengeluaran yang tidak efektif. Seperti anggaran untuk kunjungan dan studi banding mencapai Rp21T. Tak bisa dipungkiri lagi selama ini dinilai lebih kentaranya nuansa pelesiran. *Kedua*, anggaran untuk gaji pegawai tahun 2012 mencapai Rp215,7T naik Rp32,9T (18 persen) dibanding thn 2011. Padahal rata-rata gaji PNS sudah jauh lebih baik dari UMR. Tetapi pemerintah tetap menaikkan gaji PNS 10 persen, ditambah lagi kenaikan gaji tidak berkorelasi dengan peningkatan kinerja PNS dan sampai sekarang kualitas pelayanan publik pun dinilai masih buruk. Benarkah jadinya jika ada opini yang mengatakan itu adalah upaya pemerintah untuk "menutup mulut" para PNS, yang dinilai sebagai *stick holder* nya pemerintah?

Ketiga, pemerintah justru menambah pejabat tinggi yaitu jabatan wakil menteri. Tentu mereka akan mendapat fasilitas yang dibiayai dari APBN seperti rumah dan mobil dinas, biaya operasional, gaji, tunjangan jabatan, sekretaris, ajudan, sopir, dan beberapa staf pembantu dan sebagainya. *Keempat*, realisasi APBN 2011 untuk belanja modal hingga awal September 2011 hanya 26,9 persen dari APBN-P 2011. Begitu dekat akhir tahun mendadak realisasinya mendekati 90 persen! Aneh dan sungguh luar biasa bukan? Dalam waktu kurang 3 bulan meningkat 60 persen. Nampak sekali indikasi penghamburan, yang penting habis, sementara efektifitasnya nomor sembilan belas. Yang jelas tentu rawan penyalahgunaan.

Terbukti sebagaimana dalam catatan KPK pada 2008 kebocoran APBN mencapai 30 – 40 persen. Nah, kenapa pos-pos belanja itu semua tidak dipandang membebani dan sebagai pemborosan APBN? Sementara subsidi untuk rakyat dianggap beban dan pemborosan? Padahal jikalau mau, penghematan dan efisiensi lebih pas dilakukan pada pos-pos tersebut, di samping tentu efektifitasnya juga ditingkatkan. Sadarkah kita, penerimaan APBN justru dipungut dari rakyat hingga yang miskin sekalipun. Mulai dari PPH, PPN, PBB dll. Sementara para pengusaha dan investor asing sering diberi fasilitas keringanan pajak, seperti *tax holiday*, penurunan bahkan penghapusan PPN dan PPnBM, pajak ditanggung pemerintah yang cenderung terus meningkat. Tentu ini akan mengurangi pemasukan APBN atau membebani APBN.

Ada apa dibalik ini? Subsidi tidak tepat sasaran? ini cuma klaim asalan, karena sesungguhnya bertentangan dengan data. Data Susenas 2010 oleh BPS menyebutkan, 65 persen BBM bersubsidi dikonsumsi kalangan menengah ke bawah dengan pengeluaran perkapita di bawah US$ 2. Sementara itu, 27 persen digunakan kalangan menengah, 6 persen kalangan menengah atas dan 2 persen kalangan kaya. Data Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas menyebutkan, kuota BBM bersubsidi tahun 2010 sekitar 36,51 juta kiloliter (KL), dengan rincian premium 21,46 juta KL, solar 11,25 juta KL dan minyak tanah 3,8 juta KL. Sementara *konsumsi premium, 40 persen untuk sepeda motor, 53 persen untuk mobil* pribadi plat hitam, dan 7 persen untuk angkutan umum. Seandainya 50 persen dari mobil plat hitam digunakan untuk kegiatan UMKM maka sebesar 74 persen premium bersubsidi dinikmati rakyat menengah ke bawah. Ketika 1001 alasan itu hanya dibuat-buat pemerintah saja, lantas ada apa di balik kebijakan pembatasan BBM bersubsidi?

Akar masalah sebenarnya

Perlu dicatat subsidi dalam sistem kapitalis dikatakan racun. Penghilangan subsidi BBM itu adalah salah satu kesepakatan dalam pertemuan puncak 21 kepala negara anggota APEC di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat dan pertemuan G-20 di Prancis tahun lalu. Inilah alasan sebenarnya kenapa pemerintah terkesan *ngotot* memaksakan pembatasan BBM bersubsidi April mendatang.

Lebih dari itu, pembatasan BBM bersubsidi merupakan satu bagian integral dari paket kebijakan liberalisasi Migas yang menjadi amanat UU No. 22/2001 dan didiktekan IMF melalui LoI. Teks UU tersebut menyatakan pentingnya manajemen urusan minyak dan gas sesuai dengan mekanisme pasar (pasal 3). Ini memberikan peluang bahkan menyerahkan pengelolaan migas dari hulu ke hilir kepada swasta/asing seperti yang tertuntum pada pasal 9: Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh: BUMN, BUMD, koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Swasta. Jelas sudah.

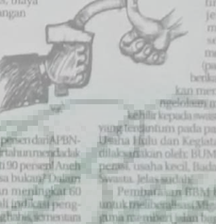

Pembatasan BBM bersubsidi itu untuk meliberalisasi Migas di sektor hilir guna memberi jalan bagi swasta asing untuk masuk dalam bisnis eceran Migas. Ini adalah rencana lama yang tertunda, menteri ESDM waktu itu, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan dalam pernyataan persnya (14/5/2003): "Liberalisasi di sektor minyak dan gas akan membuka ruang bagi para pemain asing untuk ikut andil dalam bisnis eceran BBM". Jadi, selama harga BBM masih disubsidi maka akan sulit untuk menarik masyarakat membeli BBM jualan SPBU asing itu. Tapi kalaulah akhirnya dengan pembatasan BBM bersubsidi masyarakat dipaksa untuk membeli pertamax, ya sudah SPBU asing dengan SPBU milik pemerintah tak ada bedanya, maka SPBU asing tanpa capek-capek bisa langsung kebanjiran konsumen.

Dengan begitu SPBU asing bisa rame-rame buka SPBU mereka di Indonesia. Belum lagi bila bicara sektor hulu, sama halnya juga dengan sektor hilir dengan adanya jaminan langsung yg legal (UU) maka tambang-tambang migas *rame-rame* akan 'diurus' asing/swasta. Wajar bukan? Pemerintah akan mencari 1001 alasan untuk membenarkan sikapnya yang memang tak bisa tak bersikap demikian karena sudah terikat dengan perjanjian-perjanjian tuannya (baca: asing) agar 'aman' dari rakyatnya.

Solusi Islam

Jika cerita yang ada saat ini negeri ini masih saja dalam cengkeraman perjanjian asing melalui kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan akan terus diwariskan secara turun temurun, maka suka gak suka kita harus gerah sistem ini. Kapitalisme yang memang memberi peluang kebebasan atas kepemilikan, karena memang kebebasan itu sendiri adalah pilar ideologi kapitalis – di samping kebebasan akidah, kebebasan individu, dan kebebasan berpendapat yang sedang diterapkan di negeri ini.

Sementara Pancasila hanya pelarian manakala diperlukan untuk tetap menjaga agar jangan ada ideologi lain yang menggoyang atau sampai menggantikan ideologi kapitalisme dengan segala bentuk rupanya. Karena memang begitulah hakikat sebuah ideologi. Lantas bagaimana Islam menawarkan solusi sebagai salah satu dari 3 ideologi di dunia ini? Dalam Islam semua jenis sumber energi baik Migas, listrik atau lainnya, secara *syar'i* negara tidak berhak mengusahakannya kepada individu, institusi, atau perusahaan tertentu, meskipun berasal dari warga negara sendiri, apalagi dengan asing!

Sumber energi tersebut adalah milik umum untuk umat. Rasul SAW bersabda: kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air dan api. (HR Abu Dawud dan Ahmad). Kata api mencakup semua jenis energi yang disebutkan di atas. Negara secara *syar'i* dituntut mengeksplorasi dan mendistribusikannya kepada rakyat. Jika negara menjualnya, maka hasil keuntungan penjualannya didistribusikan pula kepada rakyat. Negara tidak boleh memungut dari rakyat kecuali pungutan yang tidak melebihi biaya riil untuk mengatur pengelolaan BBM. Lantas apa lagi yang kita tunggu? Mari terapkan Syari'ah Islam dalam sistem Khilafah satu-satunya sistem yang pasti mensejahterakan umat manusia seluruhnya. *Wallahu'alam*.

Penulis adalah Alumni Tahfizul [illegible] Indonesia.

Pengumuman

Redaksi menerima kiriman karya tulis berupa artikel/opini, surat pembaca. Kirim ke alamat redaksi dengan tujuan "Redaktur Opini *Waspada*" dengan disertai CD atau melalui email: opiniwaspada@yahoo.com. Panjang artikel 5.000-10.000 karakter dengan dilengkapi biodata penulis dan kartu pengenal (KTP). Naskah yang dikirim adalah karya orisinil, belum/tidak diterbitkan di Media manapun. Tulisan menjadi milik *Waspada* dan isi tulisan menjadi tanggungjawab penulis.

SUDUT BATUAH

*** Menkeu: Kenaikan harga BBM masih wacana**
- *Sudah ribut, baru wacana, he..he..he*

*** Dana pembangunan jalan di Sumut Rp705 M**
- *Tapi masih juga belum mulus*

*** Fasilitas olahraga minim, picu munculnya geng kereta**
- ***Maklum tanah lapang pun dijinsur ruko***

Wak Dadi